

**PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA
LAYAK HUNI PADA BADAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DI
KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

Oleh :

Lily Sarvini

Email : lilysarvini26@gmail.com

Pembimbing : Mayarni, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Implementation of simple livable home development program is support program from government to poor society, left behind and located in improvement residential quality area. The aim of the program is to improve and provide society basic infrastructure needs, in village which implemented through public empowerment system but in the implementation of simple livable home development happen irregularity that is caused of lack in controlling in implementation of simple livable home development.

The theory concept that used is implementation. For analyzing in implementation of simple livable home development in Bagan Sinembah village Rokan Hilir regency, researcher used theory George R. Terry. The researcher aims to know the implementation of simple livable home development simple livable home development in Bagan Sinembah village Rokan Hilir regency. The researcher uses qualitative research with descriptive method. In collecting data, researcher uses key informant as information source and triangulasi technique as source in data validity test.

The result of research shows that implementation of simple livable home development is not suitable with the regulation which mean happen irregularity in implementation of simple livable home development in Bagan Sinembah village Rokan Hilir regency which included planning, organizing, implementation and controlling need support by all of administrator as well as relevant authorities in order to the better implementation of simple livable home development in the future.

Key Words : *Implementation, Simple Livable Home Development, Public Empowerment*

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional yang berdasarkan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan nasional tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah semata seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan sebagainya atau keputusan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat, rasa keadilan dan sebagainya, melainkan keseimbangan dan keserasian antara keduanya. Dengan adanya pembangunan berarti adanya usaha pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya, oleh karena itu pembangunan yang dilakukan harus secara menyeluruh, baik dari segi fisik maupun manusianya. Dengan kata lain pembangunan yang diadakan harus dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia ke arah yang lebih baik.

Otonomi daerah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (6) dijelaskan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Salah satu aspek penting otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam

proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada publik.

Kabupaten Rokan Hilir sangat kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA) terutama minyak bumi dan hasil alam lainnya, namun demikian menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rokan Hilir, di Kabupaten Rokan Hilir terdapat penduduk miskin sekitar 9,30% dari seluruh jumlah penduduk. Pada umumnya di setiap kecamatan masih banyak dijumpai pemukiman masyarakat yang kurang layak untuk dihuni bahkan masih banyak masyarakat miskin yang belum memiliki rumah sama sekali terutama dijumpai pada wilayah pesisir Kabupaten Rokan Hilir. (Sumber Peraturan Bupati No 19 Tahun 2014). Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berupaya mengentaskan kemiskinan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) mengeluarkan Program Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan sumber daya manusia.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan menyediakan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat di kepenghuluan/kelurahan, yang dilaksanakan melalui pola pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan melalui pola pemberdayaan masyarakat ini perlu didukung oleh struktur organisasi yang melibatkan unsur instansi pemerintah kabupaten, kecamatan, kepenghuluan/kelurahan serta kelompok masyarakat (POKMAS) sebagai pelaksana kegiatan di tingkat kepenghuluan/kelurahan. Dengan

demikian diharapkan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya kepenghuluan/kelurahan semakin tumbuh dan berkembang. Agar pelaksanaan mendapat landasan yang kuat maka diwujudkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dijelaskan bahwa swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh Kementerian Lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah Institusi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan atau kelompok masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 membuat pedoman pelaksanaan pembangunan bidang pemukiman dan prasarana desa dengan pola pemberdayaan masyarakat pada BAPEMAS Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 tahun 2007 Tentang Pembentukan organisasi, kedudukan dan tugas pokok lembaga teknis daerah pemerintah kabupaten Rokan Hilir, dalam Pasal 25 dan pasal 26 badan pemberdayaan masyarakat merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dipimpin oleh seorang kepala badan dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Badan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang pemberdayaan masyarakat.

Sasaran dari program ini adalah masyarakat di kepenghuluan/kelurahan yang tergolong miskin, tertinggal dan pada

kawasan perbaikan/peningkatan kualitas permukiman.

Program pembangunan rumah sederhana layak huni dilaksanakan dengan cara swakelola oleh masyarakat kepenghuluan/kelurahan. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan pendorong.

Dana kegiatan ini berasal dari APBD kabupaten Rokan Hilir dan dikenakan pungutan pajak sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku. Pencairan dana dibagi dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama, POKMAS dapat mengajukan dana 40% dari total kontrak dengan target fisik yang harus diselesaikan sebesar 40% dari total volume fisik. Tahap kedua, dibayar 30% apabila telah menyelesaikan pekerjaan fisik 40% dari total target fisik. Tahap ketiga, dibayar 30% apabila telah menyelesaikan pekerjaan fisik 70% dari target fisik.

Didalam melaksanakan pekerjaan diwajibkan menyelesaikan serta menyerahkan seluruh hasil pekerjaan tersebut dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Berdasarkan observasi dan media sosial dalam pelaksanaan program rumah sederhana layak huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, ada beberapa fenomena-fenomena yaitu :

1. Ketidaktepatan sasaran pembangunan rumah sederhana layak huni, pembangunan dilaksanakan diatas tanah pemerintah daerah, seharusnya pembangunan rumah sederhana layak huni dibangun diatas tanah masyarakat atau status kepemilikan rumah atau tanah adalah milik masyarakat sendiri.

(Sumber : <http://fokusriau.com/berita-ada-rlh-di-kepenghuluan-gelora-rohil-tak-tepat-guna.html>).

2. Pelaksanaan pembangunan rumah sederhana layak huni seharusnya dikerjakan oleh kelompok masyarakat (POKMAS), tetapi dilakukan oleh pemborong tanpa melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja pelaksana.

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir., dan mengetahui faktor-faktor penghambat dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

Konsep Teori

Dalam rangka teori ini penulis akan mengemukakan beberapa teori yang mendukung permasalahan yang akan dibahas.

1. Manajemen

Menurut Siswanto (2005), mengatakan manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang di sistematiskan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat di simpulkan manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang dibutuhkan dalam proses kegiatan pencapaian tujuan dengan menggunakan kegiatan orang lain. Dengan demikian manajemen adalah proses kegiatan yang harus dilakukan dalam suatu organisasi.

G.R Terry (2006), dalam teorinya menyatakan manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Yang dilakukan untuk menentukan saran-saran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya.

Yahya (2006), sebagai seni, manajemen adalah manajemen sebagai bidang ilmu pengetahuan (*science*) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan lebih bermanfaat. Praktek manajemen seharusnya didasarkan atas prinsip-prinsip teori. Manajemen bukan hanya sebagai ilmu dan seni, tetapi merupakan kombinasi dari keduanya.

Menurut Hasibuan (2005), mengatakan bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas sebagai berikut :

- a. Perencanaan
- b. Pengorganisasian
- c. Pengendalian
- d. Penempatan
- e. Pengarahan
- f. Pemotivasian
- g. Komunikasi
- h. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki sehingga akan dihasilkan suatu produk dan jasa secara efisien.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan diperlukan alat-alat sarana (*tools*) yang dapat menentukan keberhasilan tujuan organisasi. Tools merupakan syarat suatu usaha untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan.

Terry membagi sumber-sumber manajemen (*tool of manajemen*) kedalam 6M yaitu :

- a. *Men*, tenaga kerja manusia baik tenaga kerja eksekutif maupun operatif
- b. *Money*, uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan
- c. *Methods*, cara-cara yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan
- d. *Materials*, bahan-bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan
- e. *Machines*, mesin-mesin atau alat-alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan
- f. *Markets*, pasar untuk menjual output atau jasa-jasa yang telah dihasilkan.

Menurut George R. Terry dalam Manullang (2008:3), prinsip-prinsip manajemen adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan (*Planning*)

Fungsi perencanaan (*planning*) merupakan suatu kegiatan dimana di dalam kegiatan ini terdapat proses pemilihan yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan yang membuat dan menggunakan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan penuh keyakinan untuk mencapai hasil-hasil yang dikendaki.

Suatu perencanaan yang baik, haruslah mengandung formulasi 5W + 1H yaitu *What* (apa), *Who* (siapa), *Where* (dimana), *When* (kapan), *Why* (mengapa), *How* (bagaimana). Disamping itu perencanaan yang baik haruslah terdapat unsur-unsur yaitu

adanya penyusunan rencana kerja dan penerapan tujuan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Organisasi merupakan suatu kegiatan dalam menentukan, mengelompokkan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap untuk mencapai tujuan. Penugasan orang-orang dalam kegiatan ini dengan menerapkan faktor lingkungan fisik yang sesuai dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Didalam suatu organisasi terdapat beberapa unsur yaitu adanya perincian kerja, penempatan dan pembagian tugas.

3. Penggerakan (*Actuating*)

Merupakan usaha agar semua kelompok yang melakukan untuk tercapainya tujuan dengan kesadaran dan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian. Agar penggerak berjalan dengan baik dan lancar maka diperlukan beberapa hal yang dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan/pekerjaan yaitu adanya :

- a. Kepemimpinan
- b. Komunikasi dan
- c. Motivasi.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Pengawasan sebagai proses penentuan, apa yang harus di capai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apa perlumelakukan perbaikan sehingga

pelaksanaan sesuai dengan rencana. Dalam hal ini proses pengawasan ada tiga tahap yaitu menetapkan standar, standar waktu, dan melakukan penilaian.

Dimana proses dari manajemen ini dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Kasim (2005:5), pemanfaatan utama manajemen adalah untuk mengelola program kerja melalui proses-proses :

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan perencanaan
- c. Pengawasan

Menurut Handoko (2003:8), mendefinisikan manajemen adalah proses :

- a. Perencanaan
- b. Pengorganisasian
- c. Pengarahan
- d. Pengawasan

Untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi diperlukan manajemen yang baik. Menurut Haiman dalam Manullang (2008:3), manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Fayol dalam Terry (2006:21), manajemen dipandang sebagai hal yang terdiri dari pada fungsi-fungsi. Sedangkan menurut Terry (2006:4), manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.

Pelaksanaan (*actuating*) adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha mencapai sasaran

yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi pelaksanaan (*actuating*) artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki

Menurut George R.Terry dalam Manullang (2001), fungsi *Actuating* merupakan usaha agar semua kelompok yang melakukan untuk tercapainya tujuan dengan kesadaran dan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian.

Beberapa hal yang tercakup dalam *actuating* yaitu :

1. Kepemimpinan

Merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer yang menyebabkan orang lain bertindak. Pekerjaan kepemimpinan meliputi mengambil keputusan, mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara menejer dengan bawahan, memberi semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan supaya mereka bertindak, memilih orang-orang agar menjadi anggota kelompoknya, serta memperlengkapi pengetahuan dan sikap-sikap bawahan agar mereka terampil dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Koordinasi

Mengkoordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi berbagai, kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerja sama yang terarah dalam mencapai tujuan organisasi. Usaha

yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan itu antara lain dengan member instruksi, perintah.

3. Motivasi

Motivasi atau pemotivasian kegiatan merupakan salah satu fungsi manajemen berupa pemberian inspirasi, semangat dan dorongan kepada bawahan, agar bawahnya melakukan kegiatannya secara sukarela sesuai dengan yang dikehendaki oleh atasan. Pemberian inspirasi, semangat dan dorongan oleh atasan kepada bawahan ditunjuk agar bawahan bertambah kegiatannya, atau mereka lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas-tugas.

Terry dalam Mulyono (2008), mengemukakan bahwa *actuating* merupakan usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu ingin mencapai sasaran tersebut.

Dari pengertian diatas, pelaksanaan/penggerakan (*actuating*) tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan motivasi agar setiap anggota dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya.

Menurut Suyanto (2007:68), Prinsip *actuating* dalam manajemen terbagi dalam beberapa bagian yaitu :

a. Prinsip mengarah pada tujuan.

Tujuan pokok dari pengarahan nampak pada prinsip yang menyatakan bahwa makin efektifnya proses pengarahan, akan semakin besar sumbangan bawahan terhadap usaha mencapai tujuan.

b. Prinsip keharmonisan dengan tujuan.

Orang-orang bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhannya yang yang mungkin tidak sama dengan tujuan perusahaan atau organisasi. Semua ini dipengaruhi oleh masing-masing individu. Motivasi yang baik akan mendorong orang-orang untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang wajar, dan saat itulah mereka menyumbangkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan organisasi.

c. Prinsip kesatuan komando

Prinsip kesatuan komando ini sangat penting untuk menyatukan arah tujuan dan tanggung jawab para bawahan. Bila mana para bawahan hanya memiliki satu jalur didalam melaporkan segala kegiatannya dan hanya ditujukan pada satu pimpinan saja, maka pertentangan didalam pemberian instruksi dapat dikurangi, serta semakin besar tanggung jawab mereka untuk memperoleh hasil maksimal.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Prijono dan Pranarka dalam Sulistiyani (2004) pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang atau yang belum berdaya. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Pendekatan utama yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek/ program pembangunan, dalam hal ini khususnya proyek/ program pembangunan desa, akan tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunan itu sendiri.

Pemberdayaan sendiri oleh Edi Suharto (2005) adalah sebuah proses, yang dengan proses itu individu maupun komunitas memperoleh penguasaan dan kontrol atas hidup mereka sendiri dan partisipasi demokratis dalam kehidupan masyarakat mereka. Berdasarkan skema itu, pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosio politik dan kompetensi partisipatif.

Sumodiningrat (1996) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses perubahan dari ketergantungan menuju pada kemandirian. berbagai pandangan yang berkembang dalam teori pembangunan, baik dibidang ekonomi maupun administrasi, menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama pembangunan, atau dengan kata lain masyarakat tidak hanya merupakan obyek, tetapi sebagai subyek pembangunan. pandangan ini muncul sebagai tanggapan atas terjadinya kesenjangan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha yang memungkinkan suatu kelompok atau masyarakat mampu bertahan (survive) dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dalam rangka

mencapai tujuan bersama. dalam kerangka pemikiran ini, upaya memberdayakan masyarakat dapat dilakukan melalui 3 (tiga) dimensi, yakni :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. titik tolak dari pemikiran ini adalah pemahaman bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. pemberdayaan dalam konteks ini diartikan sebagai upaya untuk membangun potensi itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh masyarakat serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering), sehingga diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan serta pembukaan berbagai akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya dalam memanfaatkan peluang.
3. Melindungi, yakni dalam proses pemberdayaan harus dapat dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah.

Tujuan Pemberdayaan

Menurut catatan Ife dalam bukunya Miftachul Huda (2009) disebutkan bahwa pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan (*power*) dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged*). "*Empowerment aims to increase the power of the disadvantaged*" tulis Ife. Berdasarkan pernyataan ini, pemberdayaan pada dasarnya menyangkut dua kata kunci, yakni *power* dan *disadvantaged*.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu berusaha memaparkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang ditemukan di lapangan, yaitu mengenai pelaksanaan pembangunan rumah sederhana layak huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Alasan meneliti pada Kelurahan Simpang Baru ini karena penulis tertarik pada fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan rumah sederhana layak huni, adanya pelaksanaan yang menyimpang dari pedoman pembangunan rumah sederhana layak huni. Informan penelitian dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *snowball sampling* teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar.

Strategi dasar teknik bola salju dimaksud dengan menetapkan satu atau dua orang, tetapi karena dua orang tersebut belum dirasa lengkap dalam memberikan data maka peneliti melakukan interview dengan menetapkan satu atau beberapa orang diminta arahan, saran, petunjuk siapa baiknya yang menjadi informan berikutnya yang menurut mereka memiliki pengetahuan, pengalaman informasi yang dicari, selanjutnya penentuan informan berikutnya.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari informan di lapangan yang menjadi subjek penelitian, berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Penelitian lapangan tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi maupun data seakurat dan seobyektif mungkin, sehingga dapat menggambarkan kondisi sesuai fakta yang ada di lapangan. Baik melalui observasi maupun wawancara.

Data primer ini diperoleh dari :

1. Melakukan wawancara dengan informan penelitian yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan rumah sederhana layak huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Melalui observasi lapangan yang dilakukan di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer secara langsung yang diperoleh dari hasil buku bacaan, majalah, dokumen-dokumen, serta bahan tertulis sejenis lainnya dari instansi terkait seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Kabupaten Rokan Hilir dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rokan Hilir, maupun instansi lain yang terkait dengan objek penelitian. Data yang berjenis kualitatif dapat berupa teks, gambar dan suara.

Dalam suatu penelitian selalu terjadi proses pengumpulan data. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam suatu proses penelitian, terjadi proses pengumpulan data, proses tersebut dapat dilakukan dengan teknik-teknik tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*, yaitu penelitian secara langsung kepada sumber yang diteliti dalam menghimpun data-data yang dibutuhkan. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Observasi

Pengertian pengamatan atau observation adalah cara menghimpun bahan dan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan. Farouk dan Djaali (2005:29). Pengamatan (observation) ini dilakukan di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung kepada informan yang berhubungan dengan penelitian untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Riduwan (2012:4). Wawancara ini dilakukan bila ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam. Bertujuan untuk mendapatkan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan penting yang sudah berlalu.

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi disini berbentuk foto-foto mengenai permasalahan Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

Untuk lebih meningkatkan tingkat kepercayaan dan devaliditasi terhadap penelitian ini, penulis melakukan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh. Triangulasi secara umum merupakan *check, re-check*, dan *crosscheck* antara materi/data/informan dengan observasi penelitian selanjutnya hasil observasi di *crosscheck* melalui persepsi peneliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Menurut George R.Terry dalam Manullang (2001), fungsi *Actuating* Merupakan usaha agar semua kelompok yang melakukan untuk tercapainya tujuan dengan kesadaran dan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian.

Analisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembangunan rumah sederhana layak huni.

Berikut ini hasil dari penelitian yang dilakukan di Kecamatan Bagan Sinembah :

Tercapainya pelaksanaan pembangunan rumah sederhana layak huni di Kabupaten Rokan Hilir tidak

semua berjalan dengan mulus, kurangnya anggaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam pelaksanaan pembangunan rumah sederhana layak huni menentukan berhasil tidaknya pembangunan tersebut. Bersarnya dana yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk pembangunan di setiap desa/kelurahan adalah sebesar Rp. 225.000.000 untuk 3 (tiga) unit rumah sederhana layak huni. Bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir masih dirasakan kurang oleh penerima rumah sederhana layak huni tersebut. Diketahui mengenai besaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk pembangunan 1 (satu) unit rumah sederhana layak huni adalah sebesar Rp. 75.000.000. Bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir masih dirasakan kurang oleh masyarakat penerima bantuan rumah sederhana layak huni tersebut. Berkaitan dengan kurangnya dana yang diberikan pemerintah untuk program pembangunan rumah sederhana layak huni berdampak pada kuantitas dan kualitas bangunan rumah sederhana layak huni tersebut, hal ini dikarenakan bahan material bangunan yang cukup mahal. Untuk mendapatkan kualitas bahan bangunan yang bagus tentu diperlukan anggaran dana yang lebih agar pembangunan rumah sederhana layak huni bisa lebih maksimal.

Pembangunan rumah sederhana layak huni dibangun diatas tanah masyarakat atau status kepemilikan rumah atau tanah adalah milik masyarakat itu sendiri. Ketepatan sasaran pembangunan rumah

sederhana layak huni merupakan prioritas dari program pembangunan tersebut. Namun pada pelaksanaan pembangunan rumah sederhana layak huni adanya rumah sederhana layak huni dibangun diatas tanah pemerintah daerah, seharusnya pembangunan rumah sederhana layak huni dibangun diatas tanah masyarakat atau status kepemilikan rumah atau tanah adalah milik masyarakat sendiri. Permasalahan dalam pelaksanaan program pembangunan rumah sederhana layak huni terdapat kekeliruan dalam hal pendataan lokasi dan pengusulan pada tahap awal yang terindikasi pembangunan rumah sederhana layak huni yang tidak tepat sasaran.

Seharusnya pembangunan rumah sederhana layak huni dibangun diatas tanah masyarakat atau status kepemilikan rumah atau tanah adalah milik masyarakat itu sendiri dan pemilihan lokasi seharusnya dilaksanakan dengan prinsip pengelolaan.

Dalam melaksanakan pembangunan rumah sederhana layak huni telah ditetapkan batas waktu untuk pembangunan rumah sederhana layak huni diwajibkan menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari atau 3 bulan kalender. Bahwa waktu pelaksanaan melewati batas waktu yang telah ditetapkan disebabkan oleh faktor cuaca, dan keterlambatan pengantaraan bahan material. Faktor cuaca mempengaruhi proses pelaksanaan pembangunan rumah sederhana layak huni, karena pekerja tidak bisa melaksanakan proses pembangunan saat turun hujan ditambah lagi pelaksanaan pembangunan rumah sederhana layak

huni dilaksanakan pada saat musim hujan yaitu diantara bulan September Oktober, November dan Desember.

Kemudian terhambatnya pembangunan juga disebabkan oleh terlambat datangnya bahan material bangunan sampai kelokasi pembangunan rumah sederhana layak huni. Sehingga para pekerja harus menunggu sampai bahan material bangunan sampai dilokasi dan kendala tersebut mengakibatkan pembangunan rumah sederhana layak huni melebihi batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk itu pengadaan bahan material bangunan harus diperhatikan. Tentu, jika tidak terjadi keterlambatan datangnya bahan material bangunan, maka pelaksanaan pembangunan rumah sederhana layak huni dapat berjalan dengan lancar sehingga penyelesaian pembangunan tidak melebihi dari batas waktu yang telah ditetapkan yaitu 90 (Sembilan puluh) hari atau 3 bulan kalender.

Tenaga kerja dalam pelaksanaan pembangunan rumah sederhana layak huni adalah kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat merupakan pelaku utama dalam pelaksanaan pembangunan rumah sederhana layak huni. Pembangunan rumah sederhana layak huni dikerjakan oleh kelompok masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan rumah sederhana layak huni dikerjakan oleh tenaga kerja yang bukan masyarakat sekitar. Dalam pembangunan rumah sederhana layak huni tidak ada tukang yang disediakan oleh pemerintah maupun dari Bapemas, karena salah satu tujuan dari program ini adalah pemberdayaan terhadap masyarakat

sekitar masyarakat saling gotong royong membantu pelaksanaan pembangunan rumah sederhana layak huni. Program pembangunan rumah sederhana layak huni ini sangat berharap terhadap partisipasi masyarakat, masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan dengan semangat kerjasama.

Namun pada nyatanya pelaksanaan dilapangan mereka sangat mengandalkan adanya tukang sebagai pekerja. Sedangkan mencari tukang dengan upah yang murah atau sukarela sulit untuk ditemukan, karena mereka mengharapkan upah sesuai dengan pasaran yang berlaku.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat diketahui bahwa:

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pembangunan rumah sederhana layak huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir belum sesuai dengan peraturan bupati sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan rumah sederhana layak huni.

Pelaksanaan pembangunan rumah sederhana layak huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tidak terlepas adanya faktor penghambat yaitu pertama kurangnya dana yang diberikan, kedua ketidaktepatan sasaran pembangunan rumah sederhana layak huni, ketiga ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan, keempat tenaga kerja.

b. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pembangunan rumah sederhana layak huni peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan program pembangunan rumah sederhana layak huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir pada tahapan pelaksanaan perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) dan pihak terkait dalam pembangunan rumah sederhana layak huni, agar pembangunan rumah sederhana layak huni dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam pengorganisasian pembangunan rumah sederhana layak huni perlu dilakukan agar masing-masing bidang mengerti akan peran dan tugasnya, sehingga pengelolaan dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Afiffudin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep Teori Dan Implikasinya Di Era Reformasi*. Alfabeta : Bandung.

Anwas, Oos M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta.

Ardianto, Harun Elvinaro. 2012. *Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial*. Rajawali Pers : Jakarta.

Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung : Alfabeta

Farouk dan Djaali. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PTIK Press & Restu Agung

Hakim, Lukman. 2011. *Pengantar Administasi Pembangunan*. Ar-Ruzz Media : Jogjakarta

Handoko, T. Hani. 2003. *Manajer Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta : Gunung Agung

Hasibuan, Melayu. 2005. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta : BPFE

Huda, Miftachul. 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kasim, Iskandar. 2005. *Manajemen Perubahan*. Bandung : Alfabeta

Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan Pendekatan Konsep Dan Implementasi*. Graha Ilmu : Yogyakarta.

Manullang, 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara

Mulyono. 2008. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta : UGM

Moeleong, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Nasution, Zulkarimen. 2007. *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori Dan Pengenalannya*. PT.Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Nawawi, H. 2009. *Manajemen Strategi Organisasi Non-Propit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta : UGM.

- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kronologi: Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Direksi Cipta.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strateginya*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Siswanto, HR. 2005. *Pengantar manajemen*. Jakarta :Ikrar Mandiri Abadi.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung.
- Suyato, M. 2007. *Startegic Manajement Global*. Yogyakarta.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. RefikaAditama.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1996. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat: Kumpulan Esai tentang Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Prijono, Onny S dan A. M. W Pranarka. 1996. *Pemberdayaan: Konsep Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Terry, G.R. 2006. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta :PT. Renika Cipta.
- Trijono, Lambing. 2007. *Pembangunan Sebagai Perdamaian*. Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.
- Winardi. 2006. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung : PT. Alumni.
- Yahya, Yohannes, 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sumber-sumber lain :

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemukiman Dan Prasarana Desa Dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.